

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INVESTASI DAERAH SUMATERA UTARA

Oleh

ENNI SARI SIREGAR

**Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi
STKIP Tapanuli Selatan**

Abstract

This article focused on analyze effect of the government expenditure to investment in North Sumatera. Data used time series of 1982 - 2012. This article use analyzer model equation with method of analysis using the correlation formula " r " by Pearson product moment .The result of research concludes that the government expenditure is significant and negative effect on the investment in North Sumatera. Based on calculations performed obtained $r_{hitung} = 0,368$. When compared with r_{tabel} at 95% confidence level or error rate of 5% with degrees of freedom (df) = $N - nr = 31-2 = 29$, obtained r_{tabel} of 0.367 . It is proved that the value $r_{hitung} > r_{tabel}$ is $0.368 > 0.367$. In other words, goverment expenditure have effect to investment in North Sumatera.

Keywords : *government expenditure, investment***Pendahuluan**

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dimasa yang akan datang.

Investasi merupakan suatu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Investasi lazim juga disebut dengan penanaman modal atau pembentukan modal. Menurut Suherman (2009:185) investasi haruslah berarti penambahan barang-barang modal baru (*new capital formation*). Investasi dapat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan. *Induced investment* ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. (Suherman, 2009 : 189). Dimana pada saat tingginya tingkat investasi terimbas pada berbagai tingkat pendapatan, dan investasi seperti ini digolongkan dalam investasi terpengaruh, tetapi investasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendapatan nasional, kebijaksanaan pemerintah, keuntungan perusahaan, inflasi, tingkat suku bunga dan lain-lain. Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan investasi yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan angka yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya seperti, pembayaran gaji pegawai, pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan barang-barang publik dan sebagainya. kenaikan di dalam pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pendapatan, sedangkan kenaikan di dalam pajak akan

mempunyai dampak yang sebaliknya terhadap pendapatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah menaikkan permintaan agregat secara langsung, penurunan pajak membuat pendapatan lebih banyak dipakai untuk melakukan pengeluaran dan menaikkan permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluaran konsumen (Mishkin,2008:253). Karena *disposable income* sifatnya tetap maka kenaikan pengeluaran pemerintah harus dipenuhi melalui penurunan jumlah investasi dalam jumlah yang sama. Dengan kata lain pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap jumlah investasi.

Tabel 1
Perkembangan Investasi dan Pengeluaran Pemerintah
di Sumatera Utara Tahun 2002 – 2012

Tahun	Investasi (Miliar Rp)	Perkembangan (%)	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rp)	Perkembangan (%)
2002	472.54	-	1.021,3	-
2003	1.444,20	205.62	1.352,0	32,38
2004	1.279,61	-11.40	1.501,5	11,06
2005	1.091,15	-14.73	1.830,6	21,92
2006	2.859,55	162.07	2.184,7	19,34
2007	4.848,48	69.55	2.560,7	17,21
2008	2.845,36	-41.31	2.967,3	15,88
2009	2.732,34	-3.97	3.444,6	16,09
2010	4.131,93	51.22	3.833,2	11,28
2011	6.664,23	61.29	4.677,9	22,04
2012	8.745,18	31.23	7.677,9	64,13

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia

Tabel 1 menunjukkan bahwa investasi selalu mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini akan berdampak pada perekonomian daerah. Investasi merupakan faktor yang sangat penting dalam perekonomian daerah karena

melalui investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing akan membantu daerah untuk mengembangkan perekonomian daerahnya, apalagi setelah di tetapkannya pada tanggal 1 Januari 2001 mengenai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 22, 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32, Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah* dan Undang-Undang No. 25, 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 33, Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, berikut beberapa Peraturan pemerintah yang merincinya. Tahun 2007 pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan hingga 17,21% atau sebesar Rp.2.560,7 Miliar yang berimbas pada investasi yang juga mengalami kenaikan hingga 69,55% atau sebesar Rp 4.848,48 Miliar. Hal serupa juga dapat dilihat pada tahun 2010 pengeluaran pemerintah naik sebesar 11,28% atau sebesar Rp.3.833,2 Miliar sementara investasi juga mengalami kenaikan 51,22% atau sebesar (Rp 4.131,93Miliar), dan hal ini tidak sesuai dengan keadaan idealnya, dimana pada saat pengeluaran pemerintah meningkat maka harus diikuti dengan penurunan jumlah investasi.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan maka dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara”**.

Teori Investasi

Investasi lazim juga disebut dengan penanaman modal atau pembentukan modal. Menurut Suherman (2009:185) investasi haruslah berarti penambahan barang-barang modal baru (*new capital formation*). Sedangkan Mankiw(2001:476) mengatakan bahwa pengeluaran untuk barang-barang investasi bertujuan meningkatkan standard hidup untuk tahun-tahun mendatang dan Investasi adalah komponen GDP yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Selanjutnya Kamaruddin dalam Salim (2008 :32) mengatakan bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku meningkatkan stock modal (*capital stock*) fisik suatu negara (yakni total nilai riil “neto” atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal itu jelas memungkinkan terjadinya peningkatan output dimasa-masa mendatang (Todaro,2003:92). Menurut Salim (2008:37) mengatakan bahwa “Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor – faktor yang mempengaruhi atau tidak

berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya, pembelian surat-surat berharga.
- b. Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang didapat selain bekerja, seperti bunga dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

Senada dengan itu Henry (2009:6) mengatakan bahwa investasi *autonomus* ini, tergantung dari kemampuan masing-masing orang atau kelompok untuk melakukannya. Atau lebih tepatnya tergantung dari pendapatan (*income*) yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dirumuskan :

Investasi *autonomus* = fungsi (*income*)

Jadi investasi merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan persediaan barang modal dan perlengkapan produksi dengan tujuan untuk menambah kapasitas produksi. Investasi bertujuan sebagai penghubung antara masa kini dan masa yang akan datang, karena investasi bersifat jangka panjang. Investasi dapat berupa aktiva-aktiva tetap seperti gedung, kendaraan, mesin-mesin, peralatan, dan sebagainya, dan investasi dapat pula berbentuk sekuritas baik saham, obligasi, dan surat-surat berharga lainnya. Investasi merupakan salah satu komponen utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Dengan arti kata besarnya laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai ditentukan juga oleh besarnya investasi yang dilakukan.

Pengeluaran Pemerintah

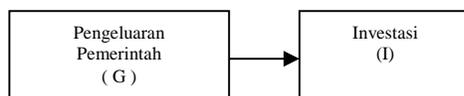
Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrument dari kebijakan fiskal dan unsur permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional. Pengeluaran pemerintah juga merupakan instrumen pengukur dimana pemerintah menentukan seberapa besar peran sektor pemerintah dan sektor swasta. Di samping itu, pengeluaran pemerintah dapat menjadi penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, dan penentu pertumbuhan GNP riil jangka pendek. Selanjutnya mankiw mengatakan bahwa Pembelian pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, Negara bagian, dan daerah. Kelompok ini meliputi peralatan militer, jalan layang, dan jasa yang diberikan pegawai pemerintah (Mankiw, 2003:26)

Jadi pengeluaran pemerintah adalah jumlah barang dan jasa yang disediakan pemerintah, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, halte, pembangunan infrastruktur seperti pasar, dan lain sebagainya. Penyediaan barang-barang publik tersebut dilakukan untuk menunjang lancarnya kegiatan perekonomian dan pada akhirnya akan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan dari pengeluaran atau belanja pemerintah akan memiliki dampak tertentu. Dampak langsungnya adalah meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sebesar G . Tetapi karena output total, maka kenaikan pengeluaran atau belanja pemerintah harus dipenuhi melalui penurunan beberapa kategori permintaan lain. Karena disposable income $Y - T$ tidak berubah, konsumsi C tidak berubah. Kenaikan pengeluaran pemerintah harus dipenuhi melalui penurunan investasi dalam jumlah yang sama. Agar investasi turun, tingkat bunga harus naik. Jadi kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan tingkat bunga meningkat dan investasi turun. Pengeluaran pemerintah dikatakan *crowd out* investasi. (Mankiw, 2007:66)

Selanjutnya menurut Asfia (2009:207) mengatakan bahwa kebijakan fiskal yaitu kebijakan yang dilakukan pemerintah (kementerian ekonomi dan keuangan) untuk mengurangi jumlah uang beredar dengan memperkecil pengeluaran pemerintah (G) dan menaikkan pajak (T). Kebijakan ini akan menurunkan daya beli masyarakat, sehingga pembelian terhadap barang konsumsi dan investasi menurun

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi jumlah investasi. Dimana pada saat pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, hal ini akan diikuti oleh kenaikan permintaan agregat, maka dengan naiknya permintaan agregat maka akan terjadi pula kenaikan pada pendapatan. Begitu pula dengan investasi, pada saat pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka akan terjadi kenaikan terhadap permintaan agregat dan hal ini akan mendorong pihak pengusaha untuk melakukan peningkatan produksi sehingga dengan terciptanya iklim usaha yang baik maka juga akan meningkatkan jumlah investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.



Gambar 1: Kerangka Berfikir Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara

Berdasarkan kepada kerangka berfikir diatas, dan data yang digunakan adalah data runtun waktu maka analisis statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang ditegaskan

dalam penelitian ini dengan taraf signifikan 5% adalah dengan menggunakan rumus korelasi "r" product moment oleh pearson, dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Hasil dan Pembahasan

HASIL

a. Deskriptif Perkembangan Investasi Daerah Sumatera Utara

Besarnya jumlah investasi adalah faktor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian suatu daerah, karena jumlah investasi atau penanaman modal yang akan ditanamkan oleh investor dapat membantu kondisi perekonomian daerah menunjukkan kepada kondisi yang kondusif, sehingga kegiatan seluruh sector perekonomian menunjukkan perkembangan yang menggairahkan. Dengan adanya investasi maka kegiatan produksi pun akan menjadi efektif dan efisien yang pada akhirnya pihak produsen akan dapat memaksimalkan keuntungan dan selanjutnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Berikut perkembangan Investasi Daerah Sumatera Utara dari tahun 1982 – 2012.

Tabel 2 memperlihatkan perkembangan investasi Daerah Sumatera Utara dari tahun 2002 – 2012. Secara keseluruhan rata-rata (mean) investasi selama periode penelitian adalah sebesar Rp.1.385.623 Miliar, sedangkan perkembangan rata-rata investasi adalah sebesar 495,49 persen. Dapat disimpulkan bahwa selama periode penelitian rata-rata perkembangan investasi cenderung mengalami fluktuasi.

Tabel 2
Perkembangan Investasi Daerah Sumatera Utara Tahun 1982 -2012

Tahun	Investasi (Miliar Rp)	Perkembangan (%)
1982	31,754	-
1983	194,978	514.03
1984	4,857	-97.51
1985	11,089	128.31
1986	191,843	1630.09
1987	5,945	-96.9
1988	624,637	10406.9
1989	143,157	-77.08
1990	2,655,211	1754.75
1991	1,202,192	-54.72
1992	967,059	-19.56
1993	166,955	-82.74
1994	186,741	11.85
1995	844,975	352.48
1996	590,950	-30.06
1997	468,874	-20.65
1998	772,548	64.77
1999	664,364	-14
2000	827,332	24.53

2001	894,065	8.07
2002	472.54	-47.33
2003	1.444,20	205.62
2004	1.279,61	-11.40
2005	1.091,15	-14.73
2006	2.859,55	162.07
2007	4.848,48	69.55
2008	2.845,36	-41.31
2009	2.732,34	-3.97
2010	4.131,93	51.22
2011	6.653,186	61.29
2012	8.745,18	31.32
Mean	1.385.623	495.49
Median	827.332,0	9.96
Maximum	6.653.186	10406.93
Minimum	4857,0	-97.51
Std. Dev	1.614.337	1922.70
KV (%)	116,51	388,04

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Olah Data

Perkembangan investasi tertinggi terjadi pada tahun 1988 yaitu sebesar 10.406,93 persen. Hal ini disebabkan karena kegiatan produksi masih berjalan sesuai dengan yang diharapkan sehingga para investor masih tertarik untuk berinvestasi karena masih memberikan keuntungan atau pengembalian modal sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 1988 penanaman modal asing mencapai jumlah yang sangat besar karena iklim usaha mengalami peningkatan sehingga investor luar negeri tidak ragu untuk menanamkan modalnya di provinsi Sumatera Utara. Selain itu tingkat suku bunga juga mengalami penurunan sehingga keputusan berinvestasi masih menguntungkan dibandingkan jika sebagian pendapatan ditabung,

Sedangkan perkembangan investasi terendah terjadi pada tahun 1984 yaitu sebesar -97,51 persen. Ini terjadi akibat pada tahun ini modal yang berasal dari luar negeri sangat menurun drastis dari tahun sebelumnya. Penanaman modal yang berasal dari luar negeri merupakan kontribusi terbesar pada investasi di Sumatera Utara, sehingga pada saat modal luar negeri tidak memberikan kontribusi jumlah investasi daerah secara otomatis langsung mengalami penurunan pula. Hal ini di duga karena masalah kurs yang membuat para investor tidak bisa memaksimalkan keuntungan yang akan diperoleh. Selain itu masalah keamanan dan masalah birokrasi juga dapat menjadi penyebab pihak luar negeri tidak mau menginvestasikan modalnya di provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya standar deviasi yang merupakan tingkat penyimpangan masing-masing data investasi dari nilai pemusatan adalah 1.614.337 Miliar. Sementara itu koefisien variasi investasi adalah sebesar 116.51 persen. Ini berarti tingkat keragaman masing-masing data investasi dibandingkan dengan nilai rata-ratanya selama 31 tahun adalah sebesar 116.51 persen.

Dengan demikian secara deskriptif perkembangan investasi mengalami fluktuasi sepanjang periode penelitian. Hal ini terjadi karena tingkat suku bunga yang selalu berubah-ubah sehingga berpengaruh pada minat investor untuk menanamkan modalnya karena ketidakpastian pada jumlah pengembalian dari modal itu sendiri. Selain itu krisis ekonomi, keamanan dan layanan birokrasi juga menjadi pemicu berfluktuasinya jumlah investasi dari tahun ke tahun.

b. Deskripsi Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara

Pengeluaran pemerintah sangat mempengaruhi terhadap berbagai variabel makro dalam perekonomian, sebab pengeluaran pemerintah dominan dialokasikan untuk kepentingan umum. Pada tabel 7 dapat dilihat perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun 1982 - 2012. Secara keseluruhan rata - rata pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Utara selama periode 1982 - 2012 adalah Rp. 1.358,88 Miliar. Sedangkan rata - rata perkembangannya adalah 46.90 persen. Nilai maksimum pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Utara terjadi pada tahun 2012 yaitu Rp. 7 677,85 miliar. Pada tabel 7 juga terlihat bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah dari tahun 1982 - 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 7
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Daerah Sumatera Utara Tahun 1982 - 2012

Tahun	Pengeluaran Pemerintah (Miliar Rp)	Perkembangan (%)
1982	104.17	-
1983	119.95	13.16
1984	134.17	11.85
1985	129.59	3.41
1986	173.23	33.68
1987	1,864.64	974.4
1988	205.2	-89.0
1989	290.36	41.5
1990	267.15	-7.99
1991	313.02	17.17
1992	336.88	7.62
1993	383.14	13.73
1994	458.7	19.72
1995	515.6	12.4
1996	584.0	13.27
1997	660.8	13.15
1998	751.0	13.65
1999	449.0	-40.21
2000	416.8	-7.17
2001	916.2	119.8
2002	1.021,3	11.47
2003	1.352,0	32,38
2004	1.501,5	11,06
2005	1.830,6	21,92
2006	2.184,7	19,34
2007	2.560,7	17,21
2008	2.967,3	15,88

2009	3.444,6	16,09
2010	3.833,2	11,28
2011	4.677,9	22,04
2012	7.677,9	64,13
Mean	1358,88	46,90
Median	584,0	13,69
Maximum	7677,85	974,40
Minimum	104,17	-89,00
Std. Dev	1692,28	178,11
KV (%)	124,53	379,77

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Olahan Data

Perkembangan pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Utara tertinggi terjadi pada tahun 1987 yaitu 974.40 persen. Hal ini terjadi karena pemerintah meningkatkan pembangunan barang – barang publik. Sementara itu dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka permintaan terhadap barang dan jasa juga akan mengalami kenaikan yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah pendapatan yang akan diterima.

Selanjutnya perkembangan pengeluaran pemerintah daerah Sumatera Utara terendah terjadi pada tahun 1988 yaitu -89.0 persen. Penurunan ini juga diikuti oleh penurunan investasi yang sangat drastis. Penurunan pengeluaran pemerintah dilakukan sebagai penerapan kebijakan fiskal.

Kemudian standar deviasi yang berarti tingkat penyimpangan masing-masing data pengeluaran pemerintah dari nilai pemusatan adalah Rp 1.692,28 miliar. Sementara itu koefisien variasi pengeluaran pemerintah adalah sebesar 124,53 persen. Artinya tingkat keragaman masing-masing data pengeluaran pemerintah dibandingkan nilai rata – ratanya selama 31 tahun adalah sebesar 124,53persen.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap investasi daerah Sumatera Utara. Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi daerah Sumatera Utara. Melalui perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi “ r ” *product moment*, maka dijelaskan bahwa nilai “r-hitung” diperoleh 0,368 apabila dikonsultasikan dengan nilai yang terdapat pada “r-tabel” *product moment* oleh Pearson pada taraf kepercayaan 95% atau dengan tingkat kesalahan 5% dengan $dk = N - n_r = 31 - 2$ diperoleh sebesar 0,367. Dengan demikian dapat diketahui bahwa nilai r_{xy} lebih besar daripada r-tabel yakni $(0,368 > 0,367)$.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif yang ditetapkan pada penelitian ini dapat diterima atau disetujui kebenarannya. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap

investasi daerah Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan terhadap investasi. Begitu pula sebaliknya, pada saat pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka jumlah investasi akan mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena pada saat pemerintah akan melakukan peningkatan terhadap pengeluarannya (membangun jalan raya, jembatan, pasar, dan barang-barang publik lainnya) maka hal ini akan terus diikuti oleh para pengusaha untuk menciptakan peluang usaha, dengan mudahnya akses transportasi maupun prasarana lainnya maka produksi akan lebih efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pendapat Dornbusch (1997:30) mengatakan bahwa pada tingkat suku bunga yang tidak berubah, tingkat pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi akan mendorong tingkat permintaan agregat. Untuk memenuhi permintaan akan barang yang semakin meningkat, output harus bertambah. Selanjutnya hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alpon Satrianto (2011) dan Dewi Ernita (2013) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap investasi. Penelitian Hadi Sasana (2008) juga menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap investasi Swasta di Jawa Tengah.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengeluaran pemerintah terhadap investasi daerah Sumatera Utara. Selanjutnya pengeluaran pemerintah mempunyai sumbangan pengaruh hanya sebesar 13,54% terhadap investasi daerah Sumatera Utara, sementara 86,46% dipengaruhi oleh faktor lain seperti, jumlah pendapatan daerah, tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, Inflasi, keamanan, dan faktor-faktor lainnya.

Referensi

- Alpon, Satrianto.dkk. 2012.*Jurnal Kajian Ekonomi.volume 1 No 01* Padang: Magister Ilmu Ekonomi FE UNP
- Asfia, Murni. 2009. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. 2010. *Sumatera Utara Dalam Angka* dari berbagai tahun. Medan : Badan Pusat Statistik(BPS)
- Bank Indonesia. 2000-2011. *Laporan Perekonomian Indonesia. Bank Indonesia*. Melalui (www.bi.go.id)

- Dewi,Ernita, dkk. 2013. *Jurnal Kajian Ekonomi.volume 1 No 02* Padang: Magister Ilmu Ekonomi FE UNP
- Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer. 1997. *Ekonomi Makro*. Jakarta : Rineka Cipta
- Hadi, Sasana. 2008. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi swasta di jawa tengah JEJAK Jurnal Ekonomi dan Kebijakan vol 1 no.1*. Semarang : FE UNNES
- Henry, Faizal Noor. 2009. *Investasi Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*. Jakarta : PT. Indeks
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi*. Alih bahasa Imam Nurmawam. Jakarta : Erlangga
- . 2007. *Makroekonomi*. Alih bahasa Imam Nurmawan dan Fitri Liza. Jakarta : Erlangga
- Mishkin, Frederic S. 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan edisi 8*. Buku 1. Alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta : Salemba Empat
- . 2008. *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan edisi 8*. Buku 2. Alih bahasa Lana Soelistianingsih dan Beta Yulianita G. Jakarta : Salemba Empat
- Salim HS, dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta : Rajawali pers
- Suherman, Rosyidi. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta : Rajawali Pers
- Todaro, Michael P dan Stephen C Smith. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Alih bahasa Haris Munandar. Jakarta : Erlangga